PROCEEDINGS CONFERENCE SISI INDONESIA III
Tut Wuri Handayani: Development of Education, Science and Technology, and Humanity for the Progress of the Indonesian People
https://conference.sinesia.id/ncrcs-sinesia | E-ISSN: 3110-1062 |
https://doi.org/10.69836/ncrcs-sinesia

Kesiapan Fiskal atau Ilusi Fiskal? Bukti Empiris dari Provinsi Aceh Menjelang Berakhirnya Dana Otonomi Khusus

Fiscal Readiness or Fiscal Illusion? Empirical Evidence from Aceh Province as Special Autonomy Funds Approach the Expiration

Reza Saputra
Reizatra@yahoo.com
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

Info Article
Submitted: 2 May 2026 | **Revised**: 13 May 2026 | **Accepted**: 14 May 2026
How to cite: Reza Saputra, "Kesiapan Fiskal atau Ilusi Fiskal? Bukti Empiris dari Provinsi Aceh Menjelang Berakhirnya Dana Otonomi Khusus", *Proceedings Conference Sisi Indonesia III*, 2026, P. 132-148.

ABSTRACT

This study aims to analyze the fiscal preparedness of Aceh Province in facing the end of the special autonomy fund by examining the effect of Regional Original Revenue (PAD) on fiscal independence and capital expenditure. Unlike previous studies that generally only emphasize the relationship between PAD and fiscal independence, this study also highlights the quality of regional expenditure allocations. The data used are time series data for the 2015–2024 period sourced from regional government financial reports and analyzed using simple linear regression. The results show that PAD has a positive and significant effect on fiscal independence, but a negative and significant effect on capital expenditure. This finding indicates that increased fiscal capacity has not been fully accompanied by increased regional development spending. Thus, despite indications of increased fiscal independence, Aceh Province's fiscal preparedness in facing the end of the special autonomy fund remains suboptimal.

Keyword: *regional own-source revenue, fiscal independence, capital expenditure, special autonomy, Aceh*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan fiskal Provinsi Aceh dalam menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus melalui pengujian pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal dan belanja modal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menekankan hubungan PAD dan kemandirian fiskal, penelitian ini juga menyoroti kualitas alokasi belanja daerah. Data yang digunakan merupakan data time series periode 2015–2024 yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal, namun berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan belanja pembangunan daerah. Dengan demikian, meskipun terdapat indikasi peningkatan kemandirian fiskal, kesiapan fiskal Provinsi Aceh dalam menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus masih belum optimal

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, kemandirian fiskal, belanja modal, otonomi khusus, Aceh.*

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasi fiskal yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah (Nurrahmadani et al., 2024). Dalam kerangka ini, desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong efisiensi alokasi sumber daya serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

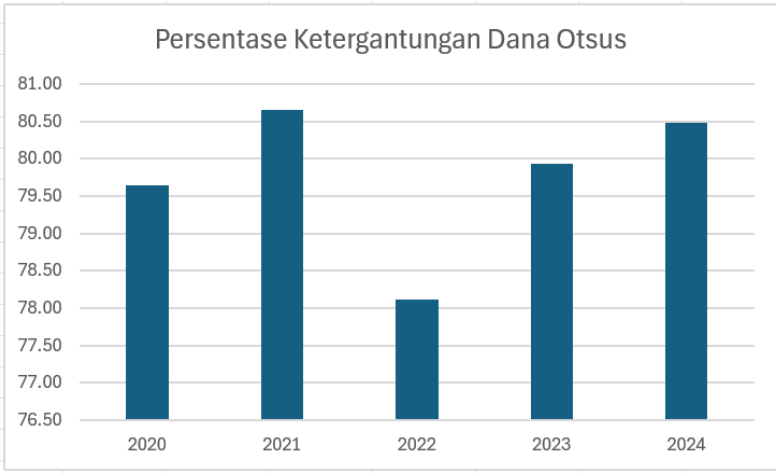
teoretis, Wallace E. Oates (1972) menegaskan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi distribusi sumber daya karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan lokal. Sementara itu, Richard Musgrave (1959) menyatakan bahwa fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam kebijakan fiskal sebagian dapat dialihkan ke pemerintah daerah.

Dalam konteks Indonesia, implementasi desentralisasi fiskal diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kebijakan ini bertujuan memperkuat kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal dan efisiensi pengelolaan anggaran (Christia & Ispriyarso, 2019). Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih relatif tinggi, yang mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal di banyak daerah belum sepenuhnya tercapai (Kusuma & Anwar, 2024). Oleh karena itu, kemampuan fiskal daerah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Surgawati, 2022).

Kemandirian fiskal tidak hanya mencerminkan keberhasilan desentralisasi, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah (Haptari et al., 2022). Dalam hal ini, pemahaman yang komprehensif terhadap struktur penerimaan daerah menjadi krusial untuk mendukung perencanaan fiskal yang lebih efisien, termasuk melalui reformasi pajak daerah, optimalisasi pengelolaan aset, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Laoli et al., 2022).

Dalam kerangka tersebut, kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri menjadi isu yang semakin strategis, khususnya bagi daerah dengan status otonomi khusus. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang memperoleh kewenangan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai implementasi dari Perjanjian Helsinki 2005. Dalam kerangka tersebut, pemerintah pusat memberikan dana otonomi khusus sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Namun, dana otonomi khusus bersifat temporer dan direncanakan berakhir pada tahun 2027. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi keberlanjutan fiskal daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.



Sumber : Data realisasi APBD Provinsi Aceh 2020-2024

Gambar 1. Grafik Persentase Tingkat Ketergantungan Aceh terhadap Dana Otsus tahaun 2020 sampai 2024

Berdasarkan Gambar 1, tingkat ketergantungan fiskal Provinsi Aceh terhadap dana otonomi khusus menunjukkan persentase yang sangat tinggi, yaitu berada pada kisaran 78%–81% selama periode 2020–2024. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar sekitar 80,6%, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar sekitar 78,1%. Meskipun terjadi fluktuasi, secara umum data tersebut menunjukkan bahwa struktur fiskal Aceh masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mandiri, sehingga berakhirnya dana otonomi khusus pada tahun 2027 berpotensi menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan fiskal daerah apabila tidak diimbangi dengan penguatan Pendapatan Asli Daerah dan efisiensi pengelolaan anggaran.

Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas belanja daerah. Secara teoretis, peningkatan kapasitas fiskal seharusnya mendorong peningkatan belanja pembangunan, khususnya belanja modal. Namun dalam praktiknya, struktur belanja daerah masih cenderung didominasi oleh belanja operasional. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketidakefisienan dalam pengalokasian anggaran.

Meskipun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering dianggap sebagai indikator utama keberhasilan desentralisasi fiskal, hubungan antara kapasitas pendapatan dan kualitas belanja daerah tidak selalu berjalan linier. Dalam konteks Provinsi Aceh, peningkatan PAD justru tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan belanja pembangunan, khususnya belanja modal. Kondisi ini menimbulkan sebuah paradoks fiskal, di mana peningkatan kapasitas fiskal tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi penguatan pembangunan daerah.

Paradoks ini menjadi semakin krusial mengingat dana otonomi khusus yang selama ini menjadi penopang utama fiskal Aceh akan berakhir pada tahun 2027. Dalam situasi tersebut, kesiapan fiskal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan mengalokasikan sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam penelitian ini bukan hanya apakah PAD mampu meningkatkan kemandirian fiskal, tetapi juga apakah peningkatan tersebut benar-benar mencerminkan kesiapan fiskal yang substansial atau justru menciptakan ilusi kemandirian fiskal.

Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal, namun kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer pusat. Selain itu, peningkatan PAD juga tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas fiskal dan pemanfaatannya.

Meskipun demikian, kajian yang mengaitkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah, kemandirian fiskal, dan belanja modal dalam konteks berakhirnya dana otonomi khusus masih terbatas. Terlebih lagi, penelitian yang secara spesifik mengkaji kesiapan fiskal Provinsi Aceh dalam menghadapi kondisi tersebut masih jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang penting untuk diisi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian fiskal dan belanja modal di Provinsi Aceh. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama yaitu **apakah Provinsi Aceh siap secara fiskal dalam menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus pada tahun 2027.**

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menekankan hubungan antara PAD dan kemandirian fiskal, penelitian ini secara khusus menyoroti ketidaksesuaian antara kapasitas pendapatan dan kualitas belanja dalam konteks berakhirnya dana otonomi khusus. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengukur kesiapan fiskal secara kuantitatif, tetapi juga menguji apakah indikator tersebut benar-benar mencerminkan kesiapan yang substantif atau hanya bersifat semu.

Kerangka Pemikiran

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Buchanan & Musgrave dalam Hasanli, 2017). Dalam kerangka ini, desentralisasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi kewenangan, tetapi juga sebagai instrumen

untuk memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya secara mandiri.

Secara teoretis, desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya serta mengurangi ketimpangan antar daerah (Nany et al., 2022). Pandangan ini sejalan dengan Wallace E. Oates yang menekankan bahwa kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat memungkinkan alokasi yang lebih optimal. Namun demikian, efektivitas desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks negara berkembang, keterbatasan kapasitas ini sering menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat, sehingga kemandirian fiskal belum sepenuhnya tercapai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator utama kapasitas fiskal daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan secara mandiri. Secara konseptual, PAD meliputi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Hafandi & Romandhon, 2020).

Dalam praktiknya, PAD berperan sebagai sumber penerimaan sekaligus ukuran kemandirian fiskal. Namun, keterbatasan basis pajak dan kapasitas administrasi menyebabkan PAD di banyak daerah belum menjadi sumber dominan. Akibatnya, ketergantungan terhadap Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) masih tinggi (Saraswati & Nurharjanti, 2021; Risdiyanto et al., 2023).

Lebih lanjut, peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas belanja. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan fiskal daerah tidak hanya terletak pada kapasitas pendapatan, tetapi juga pada efektivitas alokasi anggaran.

Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya tanpa ketergantungan berlebihan pada transfer pusat (Zakiah, 2022). Secara operasional, indikator ini diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah.

Semakin tinggi rasio tersebut, semakin kuat kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri. Namun, secara empiris, kemandirian fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD, tetapi juga oleh kontribusinya dalam struktur pendapatan. Oleh karena itu, peningkatan PAD secara nominal belum tentu meningkatkan kemandirian fiskal secara signifikan.

Dalam perspektif hubungan pusat-daerah, tingkat kemandirian yang rendah mencerminkan dominasi peran pusat, sedangkan tingkat yang tinggi menunjukkan kapasitas otonomi fiskal yang lebih kuat (Digdowiseiso & Kaliwattu, 2023).

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang, seperti infrastruktur dan fasilitas publik. Oleh karena itu, belanja modal tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal, tetapi juga kualitas pengelolaan anggaran.

Secara teoretis, peningkatan kapasitas fiskal terutama melalui Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan belanja produktif. Hal ini sejalan dengan Robert J. Barro (1990) yang menekankan pentingnya pengeluaran publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, dalam praktiknya, struktur belanja daerah sering didominasi oleh belanja operasional. Luis Servén (2007) menunjukkan bahwa tekanan fiskal jangka pendek dapat menghambat investasi publik. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi misalokasi anggaran, di mana peningkatan pendapatan tidak sepenuhnya diarahkan pada kegiatan produktif.

Dana Otonomi Khusus dan Kesiapan Fiskal

Dana otonomi khusus merupakan instrumen fiskal yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mempercepat pembangunan. Di Provinsi Aceh, kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai bagian dari implementasi Perjanjian Helsinki 2005.

Namun, dana tersebut bersifat temporer dan direncanakan berakhir pada tahun 2027. Kondisi ini menimbulkan tantangan terhadap keberlanjutan fiskal daerah. Kesiapan fiskal tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempertahankan pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan meningkatkan kemandirian fiskal dan mengalokasikan anggaran secara produktif.

Dengan demikian, kesiapan fiskal dalam penelitian ini tercermin dari hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, kemandirian fiskal, dan belanja modal sebagai indikator utama transisi menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

State of the Art and Research Gap

Literatur menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berperan penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal (Halim, 2012; Mahmudi, 2016; Saraswati & Nurharjanti, 2021). Namun, peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas belanja daerah, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas fiskal dan pemanfaatannya (Hutauruk, 2024; Simanjuntak, 2024).

Di sisi lain, hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Putra & Saipudin, 2021; Alfasyah et al., 2023), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa alokasi belanja modal tidak selalu optimal dan dipengaruhi oleh faktor lain di luar kapasitas pendapatan daerah (Widodo, 2020; Anwar & Harahap, 2023). Hal

ini menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas alokasi anggaran.

Dalam konteks daerah otonomi khusus, penelitian mengenai kesiapan fiskal pasca berakhirnya dana otonomi khusus masih terbatas, khususnya di Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan dengan mengkaji secara simultan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, kemandirian fiskal, dan belanja modal dalam menilai kesiapan fiskal daerah.

Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan model dengan banyak variabel fiskal untuk menjelaskan kinerja keuangan daerah. Namun, dalam konteks keterbatasan data time series daerah, penggunaan model yang terlalu kompleks berpotensi menghasilkan estimasi yang tidak stabil. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan parsimonious dengan menitikberatkan pada peran langsung Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator kapasitas fiskal utama.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator utama kapasitas fiskal yang berperan dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Peningkatan PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.

Di sisi lain, peningkatan PAD diharapkan mendorong peningkatan belanja modal. Namun, hubungan tersebut tidak selalu linier karena bergantung pada kualitas kebijakan fiskal. Oleh karena itu, analisis hubungan antara PAD, kemandirian fiskal, dan belanja modal menjadi penting dalam menilai kesiapan fiskal daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori non-eksperimental untuk menganalisis hubungan kausal antara Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian fiskal dan belanja modal di Provinsi Aceh. Pendekatan non-eksperimental digunakan karena penelitian tidak melibatkan manipulasi variabel, melainkan mengamati hubungan antarvariabel berdasarkan data yang telah tersedia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan empiris secara objektif dan terukur melalui teknik statistik, sehingga mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai dinamika fiskal daerah (Burke Johnson & Larry Christensen, 2024).

Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series periode 2015 sampai 2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada konsistensi data serta relevansinya dalam merepresentasikan kondisi fiskal daerah menjelang berakhirnya dana otonomi khusus pada tahun 2027. Data diperoleh dari sumber resmi pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh.

Penggunaan data sekunder resmi memastikan reliabilitas, transparansi, serta keterlacakan sumber data, sehingga hasil penelitian dapat direplikasi dan diverifikasi.

Secara operasional, penelitian ini menggunakan tiga variabel utama. Pendapatan Asli Daerah diposisikan sebagai variabel independen yang diukur dalam satuan rupiah dan merepresentasikan kapasitas fiskal daerah. Sementara itu, kemandirian fiskal sebagai variabel dependen pertama diukur menggunakan rasio antara PAD dan total pendapatan daerah, sedangkan belanja modal sebagai variabel dependen kedua diukur dalam satuan rupiah sebagai proksi kualitas alokasi anggaran pembangunan. Pengukuran variabel ini mengacu pada praktik umum dalam penelitian keuangan publik daerah, sehingga memungkinkan keterbandingan dengan studi sebelumnya (Judijanto et al., 2024; Rosyidah & Masykuroh, 2024).

Pengukuran kemandirian fiskal dirumuskan sebagai berikut:

$$Kemandirian\ Fiskal = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan}$$

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap masing-masing variabel dependen. Model estimasi yang digunakan adalah:

Model 1:

$$Y1 = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Model 2:

$$Y2 = \alpha + \beta X + \ \varepsilon$$

di mana Y1 adalah kemandirian fiskal, Y2 adalah belanja modal, X adalah PAD, α merupakan konstanta, β adalah koefisien regresi, dan ε adalah error term.

Pemilihan regresi linear sederhana didasarkan pada fokus penelitian yang menekankan pengujian pengaruh langsung satu variabel independen terhadap masing-masing variabel dependen. Selain itu, penggunaan model ini dinilai tepat mengingat jumlah observasi yang relatif terbatas dalam data time series, sehingga dapat meminimalkan risiko overfitting dan menjaga kestabilan estimasi parameter. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip parsimony dalam pemodelan ekonometrika, di mana model yang lebih sederhana dipilih selama mampu menjelaskan fenomena secara memadai.

Untuk memastikan validitas hasil estimasi, dilakukan pengujian statistik yang meliputi uji signifikansi parameter (uji t) serta koefisien determinasi (R^2). Pengujian

asumsi klasik dilakukan secara terbatas untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran serius yang dapat memengaruhi interpretasi model. Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik Eviews 14, yang umum digunakan dalam penelitian ekonomi empiris.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, kemandirian fiskal, dan belanja modal, serta menjadi dasar dalam menilai kesiapan fiskal daerah dalam menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus secara lebih objektif dan terukur.

Hasil dan pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian fiskal dan belanja modal di Provinsi Aceh menggunakan regresi linear sederhana.

Tabel 1 : Model Kemandirian Fiskal (Y1)

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
Konstanta	0.012805	0.465970	0.6537
PAD	2.19E-05	4.215263	0.0029***

Keterangan	Nilai
R-squared	0.6895
Adjusted R^2	0.6507
F-statistic	17.768
Prob (F-stat)	0.0029
Durbin-Watson	1.603

Tabel 2 : Model Belanja Modal (Y2)

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
Konstanta	1797563	4.401074	0.0023
PAD	-2.062837	-2.677279	0.0280**

Keterangan	Nilai
R-squared	0.4725
Adjusted R^2	0.4066
F-statistic	7.168
Prob (F-stat)	0.0280

Durbin-Watson	**2.514**

Keterangan :

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.10

Sumber : Data diolah menggunakan aplikasi EViews 14

Hasil estimasi pada tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kedua variabel dependen, namun dengan arah hubungan yang berbeda.

Pada model pertama, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Nilai koefisien sebesar 2,19E-05 dengan tingkat signifikansi 0,0029 menunjukkan bahwa peningkatan PAD secara langsung meningkatkan rasio kemandirian fiskal. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,689543 menunjukkan bahwa sekitar 68,9% variasi kemandirian fiskal dapat dijelaskan oleh PAD.

Sementara itu, pada model kedua, PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Koefisien sebesar -2,062837 dengan nilai signifikansi 0,028 mengindikasikan bahwa peningkatan PAD justru diikuti dengan penurunan belanja modal. Nilai R^2 sebesar 0,472568 menunjukkan bahwa sekitar 47,2% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh PAD.

Secara simultan, kedua model menunjukkan signifikansi yang baik. Nilai probabilitas uji F masing-masing sebesar 0,0029 (model kemandirian fiskal) dan 0,0280 (model belanja modal), yang berarti model secara keseluruhan layak digunakan dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

Dari sisi pengujian autokorelasi, nilai Durbin-Watson pada model kemandirian fiskal sebesar 1,603, sedangkan pada model belanja modal sebesar 2,514. Nilai tersebut berada di sekitar angka 2, yang secara umum mengindikasikan tidak adanya autokorelasi yang kuat. Namun demikian, hasil ini tidak serta-merta menunjukkan hubungan kausal, melainkan asosiasi empiris yang perlu ditafsirkan secara hati-hati mengingat keterbatasan model.

Temuan penelitian ini mengungkap adanya paradoks dalam pengelolaan fiskal daerah. Di satu sisi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah terbukti mampu memperkuat kemandirian fiskal, yang secara teoritis mencerminkan keberhasilan desentralisasi. Namun di sisi lain, peningkatan tersebut justru diikuti oleh penurunan belanja modal, yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam mendorong pembangunan jangka panjang.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas alokasi anggaran. Secara konseptual, hal ini menunjukkan bahwa ruang fiskal yang terbentuk dari

peningkatan Pendapatan Asli Daerah cenderung lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasional dibandingkan belanja produktif.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam struktur belanja Pemerintah Aceh tahun 2024 yang masih didominasi oleh belanja operasional. Realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp14,37 triliun dan belanja barang dan jasa sebesar Rp10,71 triliun, sedangkan belanja modal hanya sebesar Rp4,28 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya diarahkan pada pembiayaan pembangunan jangka panjang, melainkan masih lebih banyak digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional pemerintahan. Struktur belanja seperti ini memperkuat indikasi bahwa peningkatan PAD belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kualitas belanja daerah secara produktif dan berkelanjutan.

Fenomena ini memperkuat argumentasi bahwa kemandirian fiskal yang diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah belum tentu mencerminkan kesiapan fiskal yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, kemandirian fiskal berpotensi bersifat semu apabila tidak diikuti dengan kemampuan mengalokasikan anggaran secara strategis dan berorientasi pada pembangunan.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kesiapan fiskal tidak dapat dinilai hanya dari sisi peningkatan pendapatan, tetapi harus dilihat secara lebih komprehensif melalui keterkaitan antara kapasitas fiskal dan kualitas belanja. Tanpa adanya keseimbangan tersebut, peningkatan Pendapatan Asli Daerah berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

Namun demikian, meskipun pengaruhnya signifikan, nilai rata-rata kemandirian fiskal yang relatif rendah menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum sepenuhnya mampu menggantikan peran dana transfer, khususnya dana otonomi khusus. Dengan demikian, secara struktural, kapasitas fiskal daerah masih berada dalam tahap transisi menuju kemandirian yang lebih kuat.

Secara teoretis, peningkatan PAD seharusnya memperluas ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan, khususnya melalui belanja modal. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD di Aceh tidak sepenuhnya diarahkan pada belanja yang produktif. Kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa peningkatan pendapatan daerah lebih banyak dialokasikan pada belanja operasional dibandingkan belanja pembangunan. Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting terhadap pertanyaan utama penelitian, yaitu kesiapan fiskal Aceh dalam menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus.

Di satu sisi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah terbukti mampu meningkatkan kemandirian fiskal. Hal ini menunjukkan adanya potensi bagi daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat. Namun di sisi lain, ketidakefisienan dalam alokasi belanja, yang tercermin dari pengaruh negatif

PAD terhadap belanja modal, menunjukkan bahwa kapasitas fiskal belum dioptimalkan untuk mendukung pembangunan jangka panjang.

Dengan demikian, kesiapan fiskal daerah belum dapat dikatakan optimal. Secara struktural, daerah memiliki kapasitas untuk menjadi lebih mandiri, tetapi secara kebijakan, pengelolaan anggaran belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan fiskal. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme dalam pengelolaan fiskal daerah. Peningkatan PAD berhasil memperkuat kemandirian fiskal, tetapi tidak diikuti oleh peningkatan kualitas belanja.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada kapasitas pendapatan, tetapi juga pada efektivitas alokasi anggaran. Oleh karena itu, kesiapan fiskal tidak cukup diukur dari kemampuan menghasilkan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan mengelola dan mengalokasikannya secara produktif.

Penutup

Penelitian ini menganalisis kesiapan fiskal daerah dalam menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus di Provinsi Aceh dengan mengkaji peran Pendapatan Asli Daerah terhadap kemandirian fiskal dan belanja modal menggunakan data time series periode 2015 sampai 2024.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas pendapatan lokal berkontribusi dalam memperkuat kemampuan daerah membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran menuju kemandirian fiskal, meskipun masih terbatas.

Kedua, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan fiskal, di mana peningkatan pendapatan tidak diikuti oleh peningkatan alokasi belanja yang produktif. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi inefisiensi atau misalokasi anggaran, khususnya dominasi belanja operasional dalam struktur pengeluaran daerah.

Secara keseluruhan, kesiapan fiskal daerah masih bersifat parsial. Meskipun terdapat peningkatan kapasitas pendapatan, pemanfaatannya belum optimal dalam mendukung pembangunan. Dengan demikian, dalam konteks berakhirnya dana otonomi khusus, kesiapan fiskal Provinsi Aceh lebih mencerminkan potensi yang belum sepenuhnya teraktualisasi, sehingga memerlukan penguatan tidak hanya pada sisi pendapatan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan fiskal secara menyeluruh.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan. Pertama, diperlukan reorientasi kebijakan belanja daerah melalui peningkatan proporsi

belanja modal dalam struktur APBD, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat lebih diarahkan pada kegiatan yang produktif dan berorientasi jangka panjang.

Kedua, penguatan kualitas pengelolaan fiskal menjadi krusial, terutama melalui perencanaan anggaran yang lebih strategis, pengendalian belanja operasional, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja.

Ketiga, optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah berbasis potensi lokal perlu ditingkatkan, khususnya pada sektor-sektor unggulan daerah seperti sumber daya alam, pariwisata, dan ekonomi berbasis syariah yang menjadi karakteristik khas Provinsi Aceh.

Keempat, pemerintah daerah perlu menyusun strategi fiskal jangka panjang yang adaptif dalam menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus, dengan menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan dan efisiensi alokasi belanja guna menjaga keberlanjutan pembangunan.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas belanja daerah, sehingga menimbulkan paradoks dalam pengelolaan fiskal. Temuan ini memperkaya literatur desentralisasi fiskal dengan menyoroti bahwa indikator kemandirian fiskal yang berbasis pada PAD belum tentu mencerminkan kesiapan fiskal yang substantif.

Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam menilai kesiapan fiskal daerah otonomi khusus, khususnya dalam menghadapi berakhirnya dana otonomi khusus, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara kapasitas pendapatan dan kualitas alokasi anggaran

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan jumlah observasi yang relatif terbatas serta fokus variabel yang hanya mencakup aspek fiskal. Meskipun model yang digunakan bersifat sederhana, pendekatan ini dipilih secara sengaja untuk menekankan hubungan langsung antar variabel utama serta menghindari kompleksitas model yang berpotensi mengaburkan interpretasi hasil, khususnya mengingat keterbatasan jumlah observasi dalam data time series.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel tambahan, seperti pertumbuhan ekonomi, kualitas tata kelola, atau efisiensi belanja, serta menggunakan pendekatan metodologis yang lebih komprehensif untuk memperoleh gambaran kesiapan fiskal yang lebih menyeluruh.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing, yaitu Prof. Dr. Mukhlis, S.E., M.S., Prof. Dr. Said

Musnadi, S.E., M.Si., CIPA., dan Prof. Dr. Muhammad Adam, S.E., MBA., atas arahan, bimbingan, serta masukan berharga yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Dukungan, wawasan, dan ilmu yang diberikan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas dan penyempurnaan penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan pihak terkait yang telah menjadi objek penelitian serta berkontribusi dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan. Partisipasi dan dukungan yang diberikan sangat membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan ke depan, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

Anita, D., & Efriyenti, D. (2025). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Batam. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 8*(1). https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v8i1.11047

Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy, 98*(5), S103–S125.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 15*(1), 149–163. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal dan efektivitas fiskal Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2018–2022. *Jurnal Ilmiah Global Education, 4*(1), 219–228. https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.573

Farid Alfasyah, P., Andiny, Y., Rizal, Y., & Safuridar. (2024). Analisis pengaruh kapasitas fiskal terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 2*(4), 301–315. https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i4.1000

Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3*(2), 182–191. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337

Halim, A. (2012). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.

Hasanli, A. (2017). Fiscal decentralization and economic growth: A dilemma between theory and empiricism. *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 20*(3), 77–94. https://doi.org/10.5782/2223-2621.2017.20.3.77

Haptari, V. D., Ginting, A. M., & Aritonang, F. D. (2022). Analysis of factors affecting regional financial independence. *Eduvest - Journal of Universal Studies, 2*(4), 777–796. https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i4.412

Hutauruk, M. M. (2024). Pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8*(3), 42932–42939. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i3.20606

Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Irmawati, & Kawedar, W. (2024). Analisis pengaruh dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan alokasi belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan, 8*(2). https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v8i2.6924

Johnson, R. B., & Christensen, L. B. (2024). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches*. Sage Publications.

Judijanto, L., Wibowo, G. A., Karimuddin, K., Samsuddin, H., Patahuddin, A., Anggraeni, A. F., Raharjo, R., & Simorangkir, F. M. A. (2024). *Research design: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2024). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, 2*(2). https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art14

Laoli, M., Ndraha, A., Telaumbanua, Y., & Indah Laoli Ayler Ndraha Yasminar Telaumbanua, M. B. (2022). Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nias. *Emba, 10*(4), 1381–1389.

Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.

Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.

Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., & Kusumaningsih, A. U. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 22*(3), 247–261.

Nurrahmadani, S., Hariyati, & Armiani. (2024). Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Valid Jurnal Ilmiah, 21*(1), 162–179.

Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature, 37*(3), 1120–1149.

Putra, D. F., & Saipudin. (2025). Pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal di Kabupaten Kuala Kapuas. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 4*(1), 40–49.

Putra, N., & Amran, A. (2023). Dinamika tata kelola dana otonomi khusus di Aceh. *Jurnal Administrasi Negara, 29*(2), 192–213. https://doi.org/10.33509/jan.v29i2.1819

Risdiyanto, E., Mollet, J. A., & Hutajulu, H. (2023). Analisis kemandirian fiskal dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Papua. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 11*(2), 1813–1822. https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4851

Rosyidah, E., & Masykuroh, E. (2024). Memahami strategi dan mengatasi tantangan dalam penelitian metode kuantitatif. *Syntax Idea, 6*(6), 2787–2803.

Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, 2*, 51–64.

Servén, L. (2007). Fiscal rules, public investment, and growth. *World Bank Policy Research Working Paper*.

Simanjuntak, D. P. (2024). The influence of GRDP, PAD, and balance funds on capital expenditure allocation. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 5*(2), 23–32. https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i2.2294

Surgawati, I. (2022). Analisis derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Indonesia. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*. https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i2.3566

Widodo, S. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DBH, DAK, penerimaan pembiayaan dan penanaman modal tetap bruto terhadap alokasi belanja modal daerah. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, 4*(1), 1–23. https://doi.org/10.22212/jbudget.v4i1.19

Zakiah, K. (2022). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah terhadap indeks kemandirian fiskal daerah. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, 7*(2), 364–378. https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.137

Biografi Singkat Penulis



Reza Saputra, S.STP, M.Si lahir di Banda Aceh pada 3 Januari 1980. Ia menempuh pendidikan di Banda Aceh, melanjutkan studi di STPDN Jatinangor dan lulus pada 2003, kemudian meraih gelar Magister Sains (M.Si.) dari Universitas Indonesia pada 2007. Kariernya sebagai aparatur sipil negara menunjukkan dedikasi kuat dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.

Ia pernah menduduki berbagai posisi strategis, seperti Kepala Seksi Pengendalian Anggaran, Kepala Bagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Kepala Bidang Anggaran Aceh, hingga Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pada 2024, ia diangkat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Selain pengalaman birokrasi, Reza aktif mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan profesional, termasuk diklat kepemimpinan, manajemen risiko, dan pengelolaan keuangan negara. Kombinasi pengalaman, pendidikan, dan kompetensinya menjadikan Reza figur penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.